

EVALUASI KETERSEDIAAN FASILITAS PENDIDIKAN SLTP DI KECAMATAN MAPANGET

Orvans Lexsi Uang¹, Michael M. Rengkung², & Amanda S. Sembel³

¹Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

² & ³ Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

Abstrak. UUD 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Itu berarti bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Di Kecamatan Mapanget masih terjadi ketidakseimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan pelayanan sekolah tingkat SLTP. Hal ini terlihat dari beberapa kelurahan di Kecamatan Mapanget yang terdapat lebih dari 3 unit sekolah yang melayani 1 kelurahan, yang mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat kelebihan jumlah sekolah tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget. dan juga karena ketidak seimbangan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah yang ada sehingga terjadi tunjang tindi, penyediaan failitas pendidikan SLTP. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Mapanget dan mengevaluasi kebutuhan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mendukung penelitian ini maka data yang diperlukan yaitu data demografi penduduk persebaran lokasi sekolah, jumlah ruang kelas tiap-tiap sekolah, dan kondisi jalan sebagai pendukung aksesibilitas di Kecamatan Mapanget serta jarak jangkauan pelayanan tiap unit sekolah yang merupakan kualitas persebaran lokasi sekolah. Berdasarkan hasil penelitian Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget rata – rata hasil penilaiannya adalah cukup dan kurang dari segi pemenuhan kebutuhan, daya tampung dan tingkat keterisian sekolah. Hal ini menyebabkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di tiap kelurahan di Kecamatan Mapanget belum optimal atau (*over capacity*) kelebihan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada ditiap sekolah (Kelebihan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dalam penerimaan murid) dan (*under capacity*) sehingga perlunya perencanaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk berusia 13 -15 Tahun sebagai usia sekolah tingkat SLTP dan Jarak jangkauan pelayanan sekolah cenderung melayani kawasan yang berada di jalan kolektor Kecamatan Mapanget, namun ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP berdasarkan hasil buffering 1.200 Meter terlihat dapat menjangkau semua kelurahan yang ada di Kecamatan Mapanget sehingga efektif untuk jangkauan masyarakat atau penduduk untuk menjangkau sekolah yang ada di Kecamatan Mapanget.

Kata Kunci : Fasilitas Pendidikan, SLTP, Tingkat Pelayanan, Kecamatan Mapanget

PENDAHULUAN

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Kecamatan Mapanget merupakan pusat pelayanan kota serta kecamatan yang sedang berkembang di bidang perdagangan dan jasa, selain itu kecamatan mapanget juga bagian dari Pusat permukiman Kota Manado. Pertumbuhan populasi penduduk Kecamatan mapanget mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka ketersediaan fasilitas

Pendidikan SLTP adalah suatu hal yang sangat perlu menjadi perhatian Kecamatan Mapanget memiliki jumlah penduduk berkepadatan tinggi dengan jumlah jiwa di tahun 2016 mencapai 51.660 jiwa dengan 14.908 KK (Kecamatan Mapanget Dalam Angka 2016). Berdasarkan identifikasi dilapangan (Kecamatan Mapanget), jumlah gedung sekolah tingkat SLTP yaitu 8 (delapan) unit, yang diharapkan dapat melayani seluruh kebutuhan penduduk dalam hal fasilitas pendidikan.

Namun pada kenyataannya masih terjadi ketidak seimbangan antara penyediaan dengan kebutuhan pelayanan sekolah tingkat SLTP. Hal ini terlihat dari beberapa kelurahan di Kecamatan Mapanget yang terdapat lebih dari 3 unit sekolah yang melayani 1 kelurahan, yang mengindikasikan bahwa secara statistik terdapat kelebihan jumlah sekolah tingkat

SLTP di Kecamatan Mapanget. dan juga karena ketidak seimbangan antara jumlah murid dengan jumlah sekolah yang ada sehingga terjadi tumpang tindih, penyediaan fasilitas pendidikan SLTP Yang mengakibatkan tidak proporsionalnya fasilitas pendidikan dengan potensi jumlah siswa yang tersedia, serta jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan yang telah ada sudah melebihi kapasitas jangkauan pelayanan tiap sekolah yang akan melayani penduduk sekitar. Dan juga beberapa kelurahan yang tidak terlayani oleh sekolah tingkat SLTP, yang mengakibatkan kurangnya pemerataan fasilitas pendidikan sehingga penduduk dapat memilih sekolah di luar wilayah tempat tinggalnya maka dari itu Perlu adanya evaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan SLTP yang ada di Kecamatan Mapanget, hal ini guna mengetahui apakah fasilitas yang ada sudah sesuai dan memenuhi kebutuhan. Diperlukan pemetaan sarana pendidikan terhadap jumlah penduduk dan jarak jangkauan.

Tujuan penelitian ini adalah Mengidentifikasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Mapanget dan mengevaluasi kebutuhan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).

TINJAUAN PUSTAKA **Fasilitas Pendidikan**

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa yang dimaksud pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bila dihubungkan dengan definisi fasilitas sosial yang diuraikan sebelumnya maka fasilitas pendidikan dapat diartikan sebagai aktifitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental dan spriritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Standar Sarana dan Prasarana SMP/MTs, Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007

Standar sarana dan prasarana ini merupakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Standar ini mencakup standar sarana dan prasarana untuk sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah (SMP/MTs). Ketentuan yang diatur dalam standar ini meliputi satuan pendidikan, luasan lahan, bangunan gedung, prasarana dan sarana yang harus dimiliki fasilitas pendidikan beserta ketentuannya. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah mengidentifikasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan dan engevaluasi kebutuhan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum) maka mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 tahun 2007 sebagai acuan dalam menentukan kriteria atau standar perencanaan sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini :

1. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
2. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.
3. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan dapat menampung semua lulusan SD/MI dikecamatan tersebut.
4. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di sekolah yang telah ada, dan bila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
5. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Untuk mendukung penelitian ini maka data yang diperlukan yaitu data demografi penduduk persebaran lokasi sekolah, jumlah ruang kelas tiap-tiap sekolah, dan kondisi jalan sebagai pendukung aksesibilitas di Kecamatan Mapanget serta jarak jangkauan pelayanan tiap unit sekolah yang merupakan kualitas persebaran lokasi sekolah. Dari kategori tersebut di dapat dari hasil survey dan pengukuran di lapangan serta perhitungan berdasarkan SPM/standar pelayanan minimum. Tujuan penelitian ini yaitu mengevaluasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan (eksisting) yang terdapat di Kecamatan Mapanget dengan menghitung kebutuhan pendidikan SLTP dan mengevaluasi jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum).

Variabel - variabel yang menjadi indikator terkait dengan evaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan SLTP di Kecamatan Mapanget yaitu :

Tabel 1 Variabel Penelitian

Variabel Penelitian				
Persebaran Sekolah	Data Sekolah	Kependudukan	Kondisi Jalan	Aksesibilitas
Lokasi Sekolah SLTP	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah sekolah tingkat SLTP Jumlah Murid Jumlah Kelas 	Komposisi Penduduk Usia Sekolah SLTP (13-15 Tahun)	<ul style="list-style-type: none"> Baik Sedang Buruk 	Jarak Jangkauan (Tempuh)

Sumber : Penulis 2017

Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari observasi langsung di objek penelitian yaitu letak sekolah tingkat SLTP yang berada di kecamatan Mapanget serta kondisi jalan sedangkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Instansi penyedia data yang terkait, maupun studi pustaka yang menunjang penelitian.

Metode Analisis

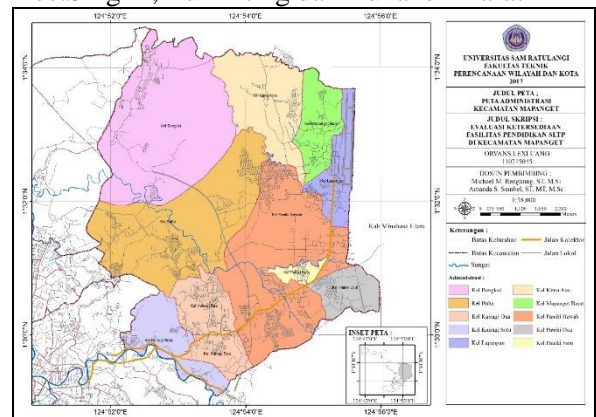
Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kondisi (eksisting) pelayanan fasilitas pendidikan dan jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan. Untuk mencapai sasaran pertama, yaitu menganalisis pelayanan fasilitas pendidikan eksisting, maka diperlukan evaluasi terhadap pola distribusi fasilitas pendidikan SLTP yang dilakukan dengan 2 analisis, yaitu analisis pemenuhan kebutuhan dan analisis keterisian fasilitas pendidikan. Sedangkan untuk sasaran kedua yakni menganalisis jarak jangkauan layanan

fasilitas pendidikan dilakukan menggunakan analisis keruangan yakni analisis buffer.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mapanget, Kota Manado. Kecamatan Mapanget terdiri dari 10 kelurahan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan : Kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan : Kabupaten Minahasa Utara
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan : Kecamatan Pall Dua,
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan : Kec.Singkil, Tuminting dan Bunaken Darat



Gambar 1 Peta Administrasi Kecamatan Mapanget

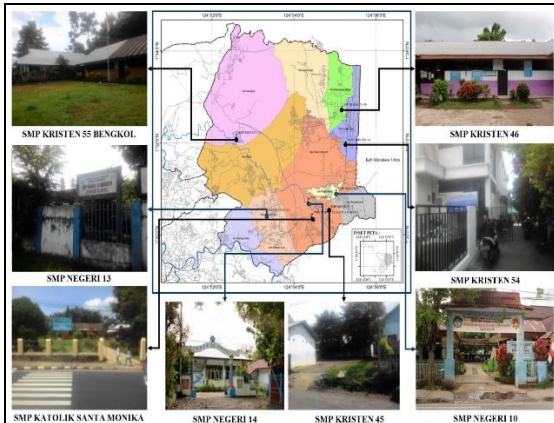
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas kondisi ketersediaan pelayanan dan jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Kecamatan Mapanget.

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget

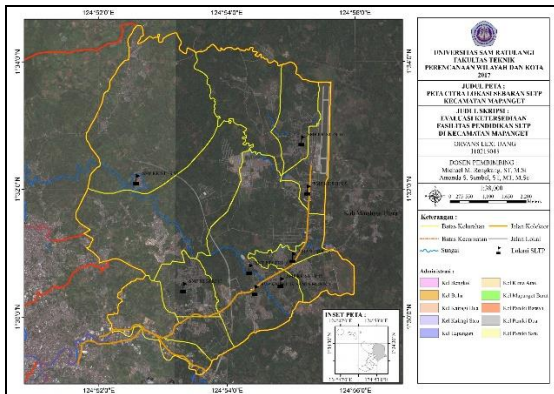
Pencapaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan. Pada jenjang pendidikan menengah tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget untuk tahun 2017 terdapat 8 (delapan) gedung sekolah SLTP yang terdiri dari 3 (tiga) gedung sekolah untuk SLTP Negeri dan 5 (Lima) gedung sekolah SLTP Swasta. Persebaran lokasi sekolah SLTP yang ada di Keca]]]zmatan Mapanget terdiri dari Kelurahan kairagi dua terdapat 1 SLTP, Kelurahan Paniki Bawah terdapat 3 SLTP, Kelurahan Mapanget Barat terdapat 1 SLTP,

Kelurahan Lapangan terdapat 1 SLTP, Kelurahan Bengkol terdapat 1 SLTP Dan Kelurahan Paniki satu terdapat 1 SLTP. Dari segi jumlah siswa SLTP terbanyak di Kecamatan Mapanget adalah SMP N 13. SMP N 13 terletak di kelurahan Paniki bawah dengan jumlah siswa 966 siswa dan jumlah ruang kelas yakni 27 unit. Sedangkan jumlah siswa SMP paling sedikit yaitu SMP Kristen 55 yang terletak di kelurahan Bengkol dengan jumlah siswa yakni 45 siswa dengan 3 ruang Kelas.



Gambar 2 Kondisi Sekolah (SLTP) di Kecamatan Mapanget

Sumber : Survey Lapangan 2017



Gambar 3 Persebaran Lokasi Sekolah (SLTP) di Kecamatan Mapanget

Sumber : Survey Lapangan 2017

Untuk mengevaluasi ketersediaan pelayanan fasilitas pendidikan di Kecamatan Mapanget, maka perlu di ketahui pola distribusi fasilitas pendidikan SLTP yang dilakukan dengan 3 analisis yaitu Analisis Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan, Analisis Daya Tampung dan Analisis Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan.

Analisis Pemenuhan Kebutuhan

Tujuan analisis ini yaitu membandingkan jumlah ketersediaan fasilitas yang telah ada dengan ketetapan dari standar yang berlaku. Standar yang berlaku dalam perencanaan sekolah yang digunakan sebagai acuan yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Pertama. Dengan menggunakan standar tersebut dapat diamati kekurangan jumlah fasilitas pendidikan yang tersedia, kekurangan tersebut dapat diketahui dengan perhitungan sebagai berikut :

$$k = \frac{P}{s} - f$$

k = jumlah kekurangan fasilitas pendidikan

p = jumlah penduduk eksisting

s = standar jumlah penduduk pendukung minimum untuk dibangun 1 buah sekolah

f = jumlah fasilitas eksisting

Untuk hasil perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget pada Tahun 2017

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Jumlah SMP Eksisting	Kebutuhan Berdasarkan Standar Pelayanan (Demand)	Pemenuhan Fasilitas Pendidikan (Supply) Berdasarkan Standar pada Tahun 2017	Total Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget Tahun 2017
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kairagi Satu	3.647	-	+1	1	1
2	Kairagi Dua	9.015	1	+3	3	4
3	Paniki Bawah	10.357	3	+2	2	5
4	Paniki Dua	5.498	-	+2	2	2
5	Lapangan	3.161	1	-	-	-
6	Mapanget Barat	5.140	1	+1	1	2
7	Kima Atas	1.092	-	-	-	-
8	Bengkol	1.442	1	-	-	-
9	Buha	9.355	-	+4	4	4
10	Paniki Satu	2.953	1	-	-	-
TOTAL		51.660	8	+15	15	18

Sumber : Hasil Analisis 2017

Keterangan :

(a) = Nomor Urut

(b) = Nama Kelurahan

(c) = Jumlah Penduduk Tahun 2017

(d) = Jumlah SLTP Eksisting

(e) = Kebutuhan Berdasarkan Standar Pelayanan SLTP (Jumlah Sekolah yang harus disediakan berdasarkan standar peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 24 Tahun 2007 yaitu 1 buah sekolah harus melayani 2000 jiwa)

(f) = Pemenuhan Fasilitas Pendidikan (Supply)

(g) = Total Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di

Kecamatan Mapanget terdapat beberapa sekolah lanjut tingkat pertama (SLTP) yang tersebar di beberapa kelurahan seperti Kairagi Dua, Paniki Bawah, Lapangan, Mapanger Barat, Bengkol dan Paniki Satu. Kelurahan yang paling banyak memiliki ketersediaan sekolah SLTP yaitu kelurahan Paniki Bawah ± 3 unit bangunan SLTP, sedangkan kelurahan yang tidak terdapat lokasi bangunan sekolah SLTP yaitu Kelurahan Kairagi Satu, Paniki Dua, Kima Atas dan Buha.

Untuk hasil perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP tahun 2017 berdasarkan standar pelayanan minimum (SPM) terdapat beberapa kelurahan yang perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan tingkat SLTP dan ada juga yang tidak perlu penambahan sekolah SLTP. Kebutuhan pemenuhan fasilitas pendidikan eksisting tahun 2017 berdasarkan standar perlu adanya penyediaan sekolah sebanyak ± 15 unit sekolah SLTP yaitu Kelurahan Kairagi Satu, Kairagi Dua, Paniki Dua, dan Buha.

Selanjutnya kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP akan di proyeksikan ke 20 tahun yang akan datang. Disini dapat dilihat proporsi kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk di tiap Kelurahan. Pertumbuhan jumlah penduduk di Kecamatan Mapanget dalam 5 tahun terakhir adalah 1.24 %. Dengan demikian untuk memproyeksi jumlah penduduk digunakan metode proyeksi geometrik dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$P_n = P_0 (1+r)^n$$

Keterangan :

P_n : Proyeksi Penduduk Tahun n

P₀ : Jumlah Penduduk Saat Ini

1 : Angka Konstan

R : Angka Pertumbuhan penduduk (Persen)

N : Jumlah Rentang Tahun Awal Hingga Tahun N

Untuk hasil perhitungan kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget pada tahun 2037 dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3 Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget pada Tahun 2037

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2037	Jumlah SMP Eksisting	Kebutuhan Berdasarkan Standar Pelayanan (Demand) Tahun 2037	Pemenuhan Fasilitas Pendidikan (Supply) Berdasarkan Standar pada Tahun 2037	Total Penyediaan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget Tahun 2037
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
1	Kairagi Satu	4.450	-	+2	2	2
2	Kairagi Dua	10.998	1	+4	4	5
3	Paniki Bawah	12.635	3	+3	3	6
4	Paniki Dua	6.707	-	+3	3	3
5	Lapangan	3.856	1	+1	1	2
6	Mapanget Barat	6.271	1	+2	2	3
7	Kima Atas	1.332	-	-	-	-
8	Bengkol	1.759	1	-	-	-
9	Buha	11.413	-	+5	5	5
10	Paniki Satu	3.602	1	-	-	-
TOTAL		63.023	8	+20	20	26

Sumber : Hasil Analisis 2017

Berdasarkan proyeksi penduduk di Kecamatan Mapanget untuk kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP pada tahun 2037 diatas, hasil kebutuhan fasilitas pendidikan tingkat SLTP tahun 2037 terdapat beberapa kelurahan yang perlu adanya penambahan fasilitas pendidikan tingkat SLTP (±6) yaitu kelurahan Kairagi Satu, Kairagi Dua, Paniki Bawah, Paniki Dua, Mapanget Barat, dan Buha karena berdasarkan perhitungan standar kebutuhan fasilitas pendidikan pada tahun 2017 total penambahan unit sekolah yakni ± 18 unit sedangkan hasil prediksi pada tahun 2037 total penambahan unit sekolah menjadi ± 26 unit.

Analisis Ketersediaan Daya Tampung

Evaluasi daya tampung diperlukan untuk mengetahui terpenuhinya kebutuhan penduduk terhadap fasilitas pendidikan di Kecamatan Mapanget. Untuk mengevaluasi ketersediaan daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan, penelitian ini menggunakan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah SLTP 13 - 15 tahun (asumsi partisipasi aktif penduduk usia sekolah SLTP di Kecamatan Mapanget 100%) dengan daya tampung fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Mapanget. Untuk menilai terpenuhinya kebutuhan penduduk terhadap fasilitas pendidikan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$pk = \frac{dt}{P_{us}} \times 100\% \dots\dots(1.2)$$

Dimana :

pk = Persentase pemenuhan kebutuhan

dt = Daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan

P_{us} = Jumlah penduduk usia sekolah 13-15 Tahun (SLTP)

Untuk hasil perhitung daya tampung fasilitas pendidikan tingkat SLTP di

Kecamatan Mapanget dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4 Daya Tampung Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget Tahun 2017

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2017	Jumlah SLTP Eksisting	Jumlah Kelas	Kapasitas Daya Tampung (Persen) Pada Tahun 2017
			Usia 13 - 15			
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
1	Kairagi Satu	3.647	288	-	-	-
2	Kairagi Dua	9.015	712	1	27	121 %
3	Paniki Bawah	10.357	818	3	26	100 %
4	Paniki Dua	5.498	434	-	-	-
5	Lapangan	3.161	250	1	3	38 %
6	Mapanget Barat	5.140	406	1	5	39 %
7	Kima Atas	1.092	86	-	-	-
8	Bengkol	1.442	114	1	3	84 %
9	Buha	9.355	739	-	-	-
10	Paniki Satu	2.953	233	1	18	247 %
TOTAL		51.660	4080	8	82	

Sumber : Hasil Analisis 2017

Keterangan :

[a] = Nomor urut

[b] = Nama Kelurahan

[c] = Jumlah Penduduk Eksisting

[d] = Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Tahun 2017

[e] = Jumlah SLTP Eksisting

[f] = Jumlah Kelas

[g]= Kapasitas Daya Tampung (Persen) = [f] x (Standar Rombel 32 Murid) / Jumlah Penduduk

Usia 13 – 15 x 100

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 kelurahan yang tidak tersedia sekolah tingkat SLTP eksisting, yaitu Kelurahan Kairagi Satu, Paniki Dua, Kima Atas dan Buha. Berdasarkan hasil perhitungan kapasitas daya tampung di tiap sekolah tingkat SLTP eksisting terdapat beberapa sekolah yang baik (efisien), cukup (overcapacity) dan kurang (tidak efisien) daya tampung sekolah tingkat SLTP.

Kelurahan yang persentase tingkat kapasitas daya tampung (efisien) dapat menampung 80-100% penduduk usia sekolah 13-15 Tahun yaitu Kelurahan Paniki Bawah dan Kelurahan Bengkol. Kelurahan yang persentase kapasitas daya tampung cukup bila menampung >100% penduduk usia sekolah 13-15 Tahun yaitu Kelurahan Kairagi Dua (121 %), dan Paniki Satu (247%). Sedangkan kelurahan yang persentase kapasitas daya tampung dinilai kurang (tidak efisien) dapat menampung <80% penduduk usia sekolah 13-15 Tahun yaitu Kelurahan Lapangan (38 %), dan Mapanget Barat (39 %).

Analisis Tingkat Keterisian

Tahapan berikutnya untuk mencapai sasaran pertama adalah dengan analisis tingkat keterisian sekolah yang membandingkan jumlah murid pada Kecamatan Mapanget dengan daya tampung atau kapasitas sekolah. Dalam menilai tingkat keterisian sekolah menggunakan perhitungan sebagai berikut :

$$tk = \frac{m}{dt} \times 100\% \dots\dots(1.3)$$

dimana :

tk = tingkat keterisian fasilitas pendidikan

m = jumlah murid

dt = daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan

Tujuan dari analisis tingkat keterisian yaitu mengetahui daya tampung atau kapasitas sekolah telah digunakan secara optimal atau apakah ada *over capacity* dan *under capacity* dalam penerimaan murid. Analisis ini menggunakan perbandingan antara jumlah murid di tiap kelurahan di Kecamatan Mapanget dengan daya tampung atau kapasitas sekolah (kelas) dan dikali 100 untuk melihat persentase tingkat keterisian setiap sekolah tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget.

Untuk hasil perhitungan tingkat keterisian fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5 Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget Tahun 2017

No	Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk Tahun 2017	Jumlah SLTP Eksisting	Jumlah Kelas	Jumlah Murid	Tingkat Keterisian (Persen) Pada Tahun 2017
						[g]
[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]	[g]
1	Kairagi Satu	3.647	-	-	-	-
2	Kairagi Dua	9.015	1	27	966	112 %
3	Paniki Bawah	10.357	3	26	586	70 %
4	Paniki Dua	5.498	-	-	-	-
5	Lapangan	3.161	1	3	51	53 %
6	Mapanget Barat	5.140	1	5	192	120 %
7	Kima Atas	1.092	-	-	-	-
8	Bengkol	1.442	1	3	45	47 %
9	Buha	9.355	-	-	-	-
10	Paniki Satu	2.953	1	18	381	66 %
TOTAL		213488	8	82	2221	

Sumber : Hasil Analisis 2017

Keterangan :

[a] = Nomor urut

[b] = Nama Kelurahan

[c] = Jumlah Penduduk Eksisting

[d] = Jumlah SLTP Eksisting

[e] = Jumlah Kelas

[f] = Jumlah Murid

[g] = Tingkat Keterisian (Persen) = [f] / [e] x (Standar Rombel 32 Murid) x 100

Berdasarkan tabel Tingkat Keterisian Fasilitas Pendidikan Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget Tahun 2017 diatas terdapat 4 kelurahan yang tidak tersedia sekolah tingkat SLTP eksisting, yaitu Kelurahan Kairagi Satu, Paniki Dua, Kima Atas dan Buha. Untuk hasil perhitungan tingkat keterisian di tiap sekolah tingkat SLTP eksisting terdapat beberapa sekolah yang baik (efisien), cukup (kelebihan) dan kurang (tidak efisien) tingkat keterisian sekolah tingkat SLTP.

Di kecamatan Mapanget tidak terdapat kelurahan yang persentase tingkat keterisian baik di tiap sekolah (efisien) karena hasil perhitungan tidak mencapai 80-100%. Kelurahan yang persentase tingkat keterisian cukup bila perbandingan jumlah murid SLTP eksisting dengan daya tampung SLTP eksisting mencapai >100% yaitu Kelurahan Kairagi Dua dan Mapanget Barat. Sedangkan kelurahan yang persentase tingkat keterisian dinilai kurang (tidak efisien) bila perbandingan jumlah murid SLTP eksisting dengan daya tampung SLTP eksisting mencapai <80% yaitu Kelurahan Paniki Bawah, Lapangan, Bengkol, dan Paniki Satu.

Dari penilaian analisis tingkat keterisian diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget dari segi daya tampung atau kapasitas sekolah yang telah digunakan belum optimal atau (*over capacity*) kelebihan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada di tiap sekolah (Kelebihan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dalam penerimaan murid) dan (*under capacity*) kekurangan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kelebihan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar tidak merata sehingga perlunya perencanaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk dan juga dapat menjangkau jarak jangkauan penduduk.

Evaluasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan SLTP di Kecamatan Mapanget

Setelah hasil perhitungan analisis diatas maka diperlukan evaluasi kapasitas daya tampung dan evaluasi tingkat keterisian fasilitas pendidikan tingkat SLTP di

Kecamatan Mapanget, maka 2 kategori tersebut diberikan penilaian tingkat pelayanan fasilitas pendidikan tingkat SLTP berdasarkan standar yang digunakan. Untuk menganalisis tingkat pelayanan fasilitas pendidikan, teknik yang digunakan adalah teknik penilaian dengan parameter penilaian yaitu baik (80-100%), cukup (>100%) dan kurang (<80%). Sedangkan SLTP yang tidak tersedianya lokasi sekolah maka penilaiannya None (Tidak Tersedia).

Tujuan dari evaluasi tingkat pelayanan fasilitas pendidikan adalah untuk mengetahui hasil penilaian berdasarkan analisis pemenuhan kebutuhan, ketersediaan daya tampung dan tingkat keterisian fasilitas pendidikan tingkat SLTP yang ada di tiap kelurahan dan kondisi jalan sebagai akses menuju fasilitas pendidikan di Kecamatan Mapanget.

Untuk melakukan analisis terhadap ketiga kategori diatas maka indikator penilaiannya dapat dilihat pada tabel 6 di atas ini :

Tabel 6 Evaluasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan SLTP di Kecamatan Mapanget

No	Nama Kelurahan	Penilaian			Keterangan
		Penilaian Kebutuhan	Tingkat Keterisian	Kondisi Jalan	
1	Kairagi Satu				Perlu Penyediaan SLTP
2	Kairagi Dua	±	±	+	Cukup
3	Paniki Bawah	+	-	+	Cukup
4	Paniki Dua				Perlu Penyediaan SLTP
5	Lapangan	-	-	+	Kurang
6	Mapanget Barat	-	±	+	Cukup
7	Kima Atas				Perlu Penyediaan SLTP
8	Bengkol	+	-	±	Cukup
9	Buha				Perlu Penyediaan SLTP
10	Paniki Satu	±	-	+	Cukup

Sumber : Hasil Analisis 2017

Keterangan :

Tidak Ada = Tidak Ada Tersedianya Bangunan Sekolah

+ = Parameter Baik

- = Parameter Kurang

± = Parameter Cukup

✓ = Tidak Tersedianya Sekolah SLTP Eksisting

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tingkat pelayanan fasilitas pendidikan sekolah tingkat SLTP diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan SLTP di kelurahan yang tersebar di Kecamatan Mapanget memiliki penilaian baik dari segi pemenuhan kebutuhan penduduk usia sekolah, tingkat keterisian dan kondisi jalan. Namun dari hasil analisis tingkat pelayanan terhadap

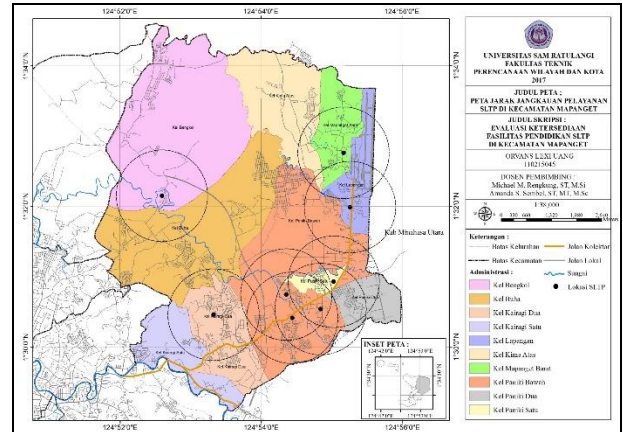
ketiga kategori indikator belum ada kelurahan yang memiliki nilai baik, rata – rata hasil penilaiannya adalah cukup dan kurang. Hal ini menyebabkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di tiap kelurahan di Kecamatan Mapanget belum optimal atau (*over capacity*) kelebihan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada di tiap sekolah (Kelebihan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dalam penerimaan murid) dan (*under capacity*) kekurangan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kelebihan jumlah fasilitas pendidikan yang tersebar tidak merata sehingga perlunya perencanaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk serta dapat menjangkau jarak jangkauan penduduk. Namun tidak semua penduduk yang berusia 13 -15 Tahun sebagai usia sekolah tingkat SLTP memilih bersekolah di daerah tempat penduduk tinggal seperti di Kecamatan Mapanget, karena penduduk akan berpikir dari segi kualitas tenaga pendidik sekolah, berpindah tempat tinggal atau studi di luar kota.

Jangkauan Pelayanan Fasilitas Pendidikan SLTP

fasilitas pendidikan adalah standar untuk mengetahui kebutuhan lahan pendidikan di suatu wilayah sehingga dapat diketahui besar penggunaan lahan yang diperlukan dengan mengarah pada standar pelayanan pendidikan yang ditentukan agar kebutuhan fasilitas pendidikan tersebut dapat merata. Sebagai acuan dalam analisis ini, untuk mengetahui standar pelayanan minimum fasilitas pendidikan terdapat pada Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001. Acuan yang digunakan untuk melihat daya jangkau jarak layanan efektif fasilitas sosial (sekolah). Diharapkan fasilitas pendidikan khususnya fasilitas pendidikan tingkat SLTP yang ada di Kecamatan Mapanget dapat dijangkau mudah oleh masyarakat maupun dari kecamatan sekitarnya. Fasilitas pendidikan tingkat SLTP memiliki eksisting jangkauan pelayanan yang berbeda. Untuk standar pelayanan minimum (SPM) unit SLTP memiliki jarak $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mil (1200 Meter).

Ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget \pm 8 unit dan tersebar di beberapa kelurahan. Analisis jangkauan pelayanan diharapkan dapat

mengevaluasi jarak jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan (SLTP) dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum). Jarak jangkauan pelayanan dilakukan menggunakan analisis spasial menggunakan metode buffering. Untuk hasil buffering jangkauan layanan tiap - tiap fasilitas pendidikan tingkat SLTP dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini :



Gambar 4 Peta Jarak Jangkauan Pelayanan Sekolah Tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget
Sumber : Penulis 2017

Berdasarkan hasil buffering jangkauan pelayanan fasilitas pendidikan tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget berdasarkan standar Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 bahwa standar pelayanan minimum (SPM) unit SLTP memiliki jarak $\frac{1}{2}$ - $\frac{3}{4}$ mil (1200 Meter). Jarak jangkauan pelayanan sekolah cenderung melayani kawasan yang berada di jalan utama Kecamatan Mapanget, namun ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP berdasarkan hasil buffering 1.200 Meter terlihat dapat menjangkau semua kelurahan yang ada di Kecamatan Mapanget sehingga efektif untuk jangkauan masyarakat atau penduduk untuk menjangkau sekolah yang ada di Kecamatan Mapanget.

Sekolah yang paling berdekatan berdasarkan hasil buffering yaitu di Kelurahan Paniki Satu dan Paniki Bawah, berdasarkan konsep *neighborhood* dapat dikatakan tidak efektif dalam merencanakan letak lokasi sekolah, karena konsep teori *neighborhood* dalam merencanakan lokasi sekolah diharapkan dapat diterapkan agar sekolah yang disediakan dapat mengukur dasar keefektifan jarak jangkauan yang mudah dicapai dengan berjalan kaki maupaun dengan menggunakan kendaraan dan adanya kontak langsung individual terhadap fasilitas pendidikan dalam

mendukung kebutuhan permukiman sehingga perlu ada tindak lanjut dari pemerintah Kota Manado untuk memperhatikan lokasi kawasan perencanaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP agar ketersediaan SLTP di Kecamatan Mapanget dapat efektif dalam menjangkau kebutuhan fasilitas pendidikan.

Aksesibilitas Pelayanan Fasilitas Pendidikan SLTP

Aksesibilitas merupakan ukuran kenyamanan atau kemudahan suatu tata guna lahan berinteraksi satu sama lain dan mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi (Black, 1981).

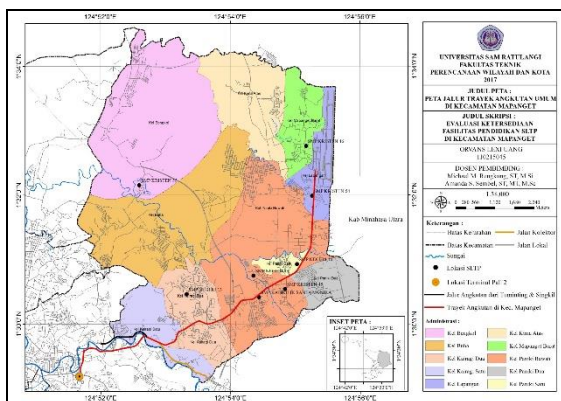
Prasarana dan sarana transportasi yang meliputi jalan dan alat angkut transportasi merupakan sarana untuk menghubungkan jarak antara daerah satu dengan yang lain. Semua sarana tersebut ditujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari satu tempat ke tempat lain maupun membantu kemudahan siswa dari tempat tinggal menuju ke sarana pendidikan (sekolah).

Trayek angkutan umum di Kecamatan Mapanget pada umumnya di mulai dari Terminal Pall 2 sampai di Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget (Dinas Perhubungan Kota Manado).

Tabel 7 Trayek Angkutan Umum Akses Ke SLTP di Kecamatan Mapanget

No	Nama Sekolah	Akses Kedekatan Angkutan Umum ke Sekolah	Lokasi Sekolah Dekat dengan Jalan Utama	Lokasi Sekolah Jauh dengan Jalan Utama
1	SMP N 10	✓	✓	-
2	SMP N 13	✓	✓	-
3	SMP N 14	✓	✓	-
4	SMP Katolik Santa Monika	✓	✓	-
5	SMP Kristen 45	✓	✓	-
6	SMP Kristen 46	✓	✓	-
7	SMP Kristen 55	-	-	✓
8	SMP Kristen Betania Lapangan	✓	✓	-

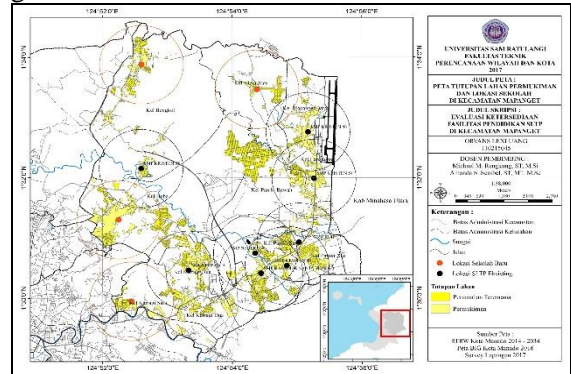
Sumber : Hasil Analisis 2017



Gambar 5 Peta Jalur Trayek Angkutan Umum di Kecamatan Mapanget

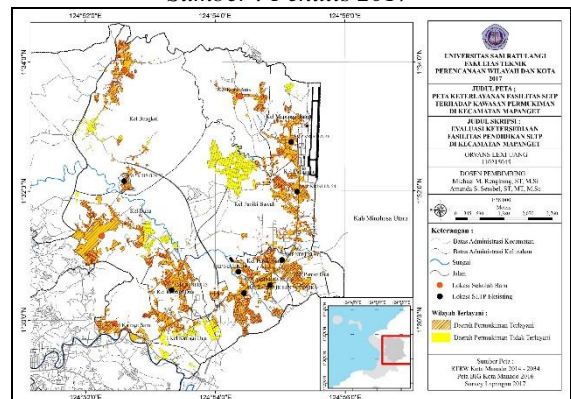
Sumber : Survey Lapangan Penulis 2017

Kelurahan yang tidak terdapat lokasi fasilitas pendidikan tingkat SLTP perlu adanya perencanaan pembangunan fasilitas pendidikan tingkat SLTP baru di 4 lokasi tersebut, namun untuk Kelurahan Paniki Dua tidak perlu dibangun fasilitas pendidikan SLTP dikarenakan berdasarkan peta radius jangkauan pelayanan sekolah SLTP, Kelurahan Paniki Dua dapat mudah mengakses ke beberapa terdekat. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 10 dibawah ini :



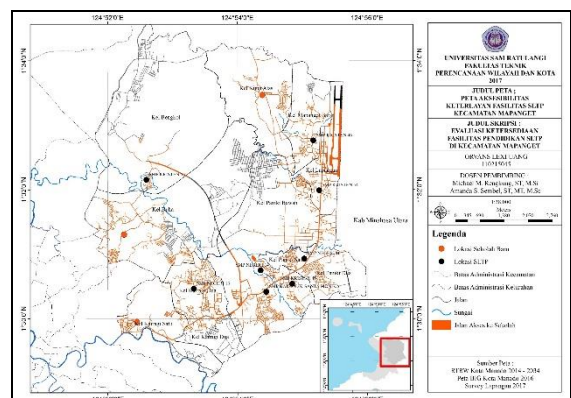
Gambar 6 Peta Radius Lokasi Pembangunan Sekolah Tingkat SLTP Baru di Kecamatan Mapanget

Sumber : Penulis 2017



Gambar 7 Peta Sebaran Daerah Permukiman yang Terlayani Fasilitas SLTP di Kecamatan Mapanget

Sumber : Penulis 2017



Gambar 8 Peta Aksesibilitas Keterlayanan Fasilitas SLTP di Kecamatan Mapanget

Sumber : Penulis 2017

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SLTP di Kecamatan Mapanget maka dapat disimpulkan :

1. Jenjang pendidikan menengah tingkat SLTP di Kecamatan Mapanget untuk tahun 2017 terdapat 8 (delapan) gedung sekolah SLTP yang terdiri dari 3 (tiga) gedung sekolah untuk SLTP Negeri dan 5 (Lima) gedung sekolah SLTP Swasta. Persebaran lokasi sekolah SLTP yang ada di Kecamatan Mapanget terdiri dari Kelurahan kairagi dua terdapat 1 SLTP, Kelurahan Paniki Bawah terdapat 3 SLTP, Kelurahan Mapanget Barat terdapat 1 SLTP, Kelurahan Lapangan terdapat 1 SLTP, Kelurahan Bengkol terdapat 1 SLTP Dan Kelurahan Paniki satu terdapat 1 SLTP.
2. Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Mapanget rata – rata hasil penilaiannya adalah cukup dan kurang dari segi pemenuhan kebutuhan, daya tampung dan tingkat keterisian sekolah. Hal ini menyebabkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang tersebar di tiap kelurahan di Kecamatan Mapanget belum optimal atau (*over capacity*) kelebihan murid yang tidak sesuai dengan jumlah kelas yang ada di tiap sekolah (Kelebihan murid dari daya tampung sekolah menandakan adanya kekurangan jumlah fasilitas pendidikan dalam penerimaan murid) dan (*under capacity*) sehingga perlunya perencanaan fasilitas pendidikan yang menyesuaikan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah penduduk berusia 13 -15 Tahun sebagai usia sekolah tingkat SLTP dan Jarak jangkauan pelayanan sekolah cenderung melayani kawasan yang berada di jalan kolektor Kecamatan Mapanget, namun ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SLTP berdasarkan hasil buffering 1.200 Meter terlihat dapat menjangkau semua kelurahan yang ada di Kecamatan Mapanget sehingga efektif untuk jangkauan masyarakat atau penduduk untuk menjangkau sekolah yang ada di Kecamatan Mapanget.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku :

- Barnawi., Arifin Muhammad, *Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta: Ruzz Media
- Daryanto., Farid, Mohammad, 2013, *Konsep Dasar Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Yogyakarta: Gava Media
- Mirsa, Rinaldi, 2012, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sadana, Agus, 2014, *Perencanaan Kawasan Permukiman*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sinulingga, Budi, 1999, *Pembangunan Kota Tinjauan Regional dan Lokal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Tarigan, R., 2006. *Perencanaan Pembangunan Wilayah (Edisi Revisi)*. Jakarta. PT. Bumi Aksara.
- Umar, Husein. 2002. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Skripsi/Jurnal

- Malik, Andi (2009) *ARAHAN DISTRIBUSI FASILITAS PENDIDIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS (SLTA) DI KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2028*. S2 Thesis, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
- Prayogo, I Putu Harianja (2015) *EVALUASI KETERSEDIAAN PRASARANA DAN SARANA FASILITAS PENDIDIKAN BERDASARKAN PENDEKATAN TEORI NEIGHBORHOOD UNIT Studi Kasus : Kecamatan Wenang*. S1 Skripsi, UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
- Tahiya, Tanila (2016) *PERENCANAAN FASILITAS PENDIDIKAN TINGKAT SLTA DI KABUPATEN MERAUKE Studi Kasus : Kabupaten Merauke*. S1 Skripsi, UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
- Takumansang, Esli D, 2010, “Kajian Penempatan Fasilitas Pendidikan Dasar dan Menengah Dalam Aspek Sistem Informasi Geografis”. Jurnal

Tekno, Volume 08, No 54:
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/tekno/article/view/4192> Di akses
03 – Maret 2016

Perundang-undangan/Regulasi :

Depdiknas. 2006. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (SMA/MA).

Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia. 1987. *Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 378/KPTS Tahun 1987, Tentang Petunjuk Perencanaan Kawasan Permukiman Kota*. Jakarta.

Dokumen BPS Kecamatan Mapanget 2016

Dokumen RTRW Kota Manado Tahun 2014-2034

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional